Gubernur DIY: Pembukaan Pendidikan Tatap Muka Dimulai dari PT

ANTARA/Luqman Hakim

Gubernur DIY Sri Sultan HB X

YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap pembukaan kegiatan pendidikan tatap muka akan dilakukan secara bertahap dimulai dari perguruan tinggi kemudian diikuti jenjang di bawahnya.

"Mau saya itu ya dari kampus dulu baru nanti belakangan PAUD (pendidikan anak usia dini). Bukan PAUD dulu baru mahasiswa," kata Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (3/8).

Menurut Sultan, pembukaan pendidikan dengan tatap muka di masa pandemi baik untuk mahasiswa di kampus maupun anak-anak sama-sama memiliki risiko penularan.

Oleh sebab itu, hingga saat ini Raja Kraton Yogyakarta ini masih menginginkan agar pendidikan jarak jauh (PJJ) diperkuat. Namun demikian, menurut dia, jika dimulai dari anak-anak risiko penularannya terlalu besar. "Kita kan masih menunggu kehadiran mahasiswa maupun anak-anak sekolah, jadi risiko-risiko itu gede banget," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan bahwa Gubernur DIY selalu mengingatkan agar pembukaan sekolah atau perguruan tinggi tidak dilakukan secara gegabah. "Kita ini kan tidak boleh gegabah ada pembelajaran tatap muka. Terutama untuk kelas-kelas kecil sehingga kita nanti uji cobanya justru di mahasiswa," kata dia.

Menurut dia, pembukaan pendidikan dengan tatap muka tidak perlu tergesa-gesa agar tidak justru memunculkan klaster penularan COVID-19 di lingkungan pendidikan. "Kalau kita punya pengalaman untuk mahasiswa kemudian kita geser ke SMA. Pelan-pelan kita tidak tergesa-gesa. Maunya Ngarso Dalem (Sultan HB X) supaya tidak ada klaster pendidikan," kata Aji. **(ANTARA)**

Presiden Perintahkan Kampanye Masif Pakai Masker dalam Dua Pekan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan kampanye masif pakai masker dalam dua pekan ke depan sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19.

ANTARA/HO/Biro Pers Setpres

Presiden Joko Widodo

"Saya ingin fokus saja mungkin dalam dua minggu kita fokus kampanye mengenai pakai masker," kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas dengan topik Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8).

Presiden mengatakan *case recovery rate* di Indonesia dari data terakhir 61,9 persen yang disebutnya semakin baik dan diharapkan terus meningkat angkanya. Oleh sebab itu Presiden ingin agar protokol kesehatan dan perubahan perilaku di kalangan masyarakat harus betul-betul menjadi perhatian.

Maka Presiden pun meminta agar kampanye perubahan perilaku itu dilakukan secara bertahap mulai dari tahap awalnya kampanye memakai masker yang masif. "Nanti dua minggu berikut kampanye jaga jarak atau cuci tangan misalnya, tidak dicampur urusan cuci tangan, urusan jaga jarak, urusan tidak berkerumun, pakai masker kalau barengan," katanya.

Menurut dia, kampanye yang bersamaan akan sulit ditangkap atau diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. "Mungkin yang menengah atas bisa ditangkap dengan cepat tapi yang di bawah ini menurut saya memerlukan satu persatu," katanya.

Kepala Negara pun ingin melibatkan PKK untuk bisa membantu melakukan kampanye penggunaan masker dari pintu ke pintu. "Saya kira PKK ini saya pikir sangat efektif *door to door* urusan masker," katanya.

Ia menambahkan, perubahan perilaku masyarakat harus benar-benar didorong dengan kampanye dan komunikasi masif melalui televisi hingga media sosial selama dua pekan dengan cara yang berbeda-beda. **(ANTARA)**

Pasien Sembuh dari COVID-19 di DIY Bertambah Menjadi 434 Orang

YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 di daerah itu pada Senin (3/8) bertambah 13 sehingga total menjadi 434 orang. "Laporan jumlah kasus sembuh sebanyak 13 kasus sehingga total kasus sembuh menjadi sebanyak 434 kasus," kata Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan COVID-19 Berty Murtiningsih melalui keterangan resminya di Yogyakarta, Senin.

Ia mengatakan jika dilihat berdasarkan wilayah domisili, 13 pasien sembuh itu terdiri atas 12 kasus asal Kabupaten Bantul dan 1 kasus asal Kabupaten Sleman. Selain pasien sembuh, Berty juga mencatat 12 tambahan pasien terkonfirmasi positif sehingga jumlah kasus positif COVID-19 di DIY menjadi 772 orang.

Pasien positif itu terdiri atas empat pasien asal Gunung Kidul yakni kasus 766, laki laki, 42 tahun riwayat kontak kasus 536; kasus 767, perempuan, 39 tahun, riwayat kontak kasus 536; kasus 768, laki laki, 35 tahun, riwayat perjalanan Sidoarjo, serta kasus 769, perempuan, 29 tahun riwayat kontak kasus 552. Berikutnya, enam pasien dari Bantul yakni kasus 770, perempuan, 54 tahun, riwayat skrining karyawan kesehatan; kasus 771, perempuan, 27 tahun riwayat skrining karyawan kesehatan; kasus 772, perempuan, 40 tahun, riwayat skrining karyawan kesehatan; kasus 773, perempuan, 33 tahun, riwayat skrining karyawan kesehatan; kasus 774, perempuan, 37 tahun riwayat krining karyawan kesehatan; kasus 775, laki laki, 47 tahun riwayat pelaku perjalanan Jakarta. Sisanya, dua pasien dari Kabupaten Sleman yakni kasus 776, laki laki, 35 tahun riwayat dalam penelusuran, dan kasus 777, laki laki, 52 tahun riwayat perjalanan Kalimantan.

Menurut Berty, tambahan kasus hari ini berasal dari hasil pemeriksaan laboratorium di DIY terhadap 468 sampel spesimen dari 331 orang. Berdasarkan data dari rumah sakit rujukan, ia mencatat total suspek COVID-19 hingga Ahad tercatat 10.902 orang. Dari jumlah suspek tersebut, 772 orang terkonfirmasi positif di mana 434 orang di antaranya sembuh, dan 21 orang meninggal. **(ANTARA)**

Bupati Banjarnegara: Pembukaan Sektor Wisata Dilakukan Bertahap

BANJARNEGARA - Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah Budhi Sarwono mengatakan pembukaan sektor pariwisata di wilayah setempat dilakukan secara bertahap guna memastikan kesiapan protokol kesehatan.

"Pembukaan objek-objek wisata dilakukan secara bertahap untuk tahap pertama telah dilakukan pada tanggal 1 Agustus kemarin," katanya di Banjarnegara, Senin (3/8).

Dia mencontohkan salah satu objek wisata yang telah dibuka adalah Serulingmas Zoo yang berlokasi di wilayah Kutabanjarnegara. "Objek wisata yang telah dibuka telah dipastikan siap menerapkan protokol kesehatan baik bagi karyawan maupun bagi wisatawan," katanya.

Bupati menyebutkan pengelola telah melakukan pengaturan kapasitas jumlah pengunjung agar tidak terjadi kerumunan di lokasi objek wisata. "Pengelola objek wisata juga membuat aturan wajib memakai masker, menjaga jarak fisik dan rajin cuci tangan," katanya.

Bupati berharap pembukaan sektor wisata di wilayah ini akan berdampak positif bagi perekenomian lokal. "Yang menjadi catatan adalah bagaimana masyarakat bisa tetap produktif namun juga tetap aman dari kemungkinan paparan virus," katanya.

Dengan demikian, kata bupati, perlu adanya rasa disiplin tinggi untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru.

"Disiplin dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan adalah kunci," katanya.

Sebelumnya pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru mengatakan edukasi mengenai protokol kesehatan bagi wisatawan harus dilakukan secara simultan sebagai salah satu upaya mencegah COVID-19.

Dia menambahkan edukasi yang dilakukan secara terus menerus diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wisatawan. Kesadaran mengenai adaptasi kebiasaan baru diperlukan agar masyarakat bisa tetap produktif namun juga tetap waspada dan tidak abai terhadap protokol kesehatan.

Dia juga menilai perlu adanya pemantauan yang intensif mengenai penerapan protokol kesehatan di objek wisata. Intinya adalah protokol kesehatan yang ketat, baik dari aspek kebersihan, kesehatan, dan keamanan, membatasi jumlah pengunjung agar dapat diterapkan jarak fisik hingga kesiapan infrastruktur pariwisata dalam menyambut adaptasi kebiasaan baru," katanya. **(ANTARA)**

Upaya Pencegahan Karhutla di Masa Pandemi COVID-19

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bergerak cepat melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, 23 Juni 2020.

Saat itu, Presiden Jokowi menyampaikan empat arahan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan yakni pentingnya manajemen lapangan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini, penegakan hukum, dan penataan ekosistem gambut. Dari arahan itu, penting sekali perlunya manajemen komunikasi, termasuk pemusatan data situasi real time tentang titik-titik hot spot kebakaran hutan dan penanganannya. Demikian pula aspek-aspek pemberitaan lain, misalnya memblow-up pemberitaan mengenai penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah karhutla.

Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemkominfo melakukan berbagai langkah aktif pencegahan karhutla, di antaranya komunikasi intensif dengan Satgas Karhutla Daerah dan Kepala Daerah Operasi Manggala Agni, meningkatkan partisipasi aktif para-pihak dalam pencegahan karhutla, patroli mandiri dan patroli terpadu di Sumatera dan Kalimantan (97 desa) dari target 440 desa rawan karhutla, sekaligus sosialisasi pencegahan COVID-19, serta melakukan kampanye dan publikasi kerja lapangan upaya dalkarhutla dan penyuluhan COVID-19 di media online dan media sosial.

Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga terus ditingkatkan yakni dengan menggandeng organisasi agama untuk membantu kampanye pencegahan karhutla dalam acara keagamaan dan sosial masyarakat, layanan SMS Blast peringatan dini karhutla kerja sama dengan Kemenkominfo dan operator seluler, pembinaan Manggala Agni dan peningkatan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai regu pemadam karhutla di kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) dan juga penyediaan pondok kerja bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau Daops Manggala Agni.

Kemkominfo juga memelopori penggunaan teknologi dalam pencegahan dan penanganan karhutla seperti pemanfaatan CCTV Thermal Camera untuk deteksi dini karhutla secara online, pengembangan aplikasi berbasis website dalam rangka penguatan patroli terpadu (manajemen data) kerja sama dengan IP, dan juga pemantauan aktivitas pelaku usaha di bidang kehutanan melalui pelaporan online di http://siponi.menlhk.go.id.

ANTARA/Anggi Romadhoni

Dua petugas Manggala Agni berupaya memadamkan api di lahan gambut Riau.

Mencegah Duet Maut

Pada jumpa pers Forum Merdeka Barat 9 yang digelar Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menggarisbawahi upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengupayakan monitoring titik panas dan deteksi dini sebagai salah satu cara untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di masa pandemi COVID-19.

"Jangan sampai terjadi duet maut, karhutla sama COVID-19. Itu saya paling takut sama kata-kata itu," kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Menteri berlatarbelakang birokrat karir dari tingkat bawah ini menegaskan, karhutla tak bisa diselesaikan oleh negara tanpa bantuan publik. Karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla. Dalam istilah Siti Nurbaya, bagaimana di tingkat tapak masyarakat kita mengontrol dirinya sendiri.

Adanya partisipasi masyarakat peduli api tentu memberikan sisi yang positif dalam hal keterlibatan publik. Tapi, itu saja tidak cukup. Lebih dari itu, diperlukan kesadaran hukum masyarakat secara bersama-sama.

Selain membutuhkan partisipasi masyarakat, patroli mandiri dan patroli terpadu juga dilakukan di Sumatera dan di Kalimantan dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19 dan sekaligus sosialisasi pencegahan COVID-19.

Selain itu, kampanye dan publikasi kerja lapangan terkait upaya pengendalian karhutla dan penyuluhan tentang COVID-19 di media daring juga terus dilakukan, termasuk dengan menggandeng organisasi agama untuk membantu kampanye pencegahan karhutla dalam acara keagamaan dan sosial di dalam masyarakat.

Di sinilah Kemkominfo berperan aktif berjalan seiring dengan kementerian teknis. Pembentukan Desk Karhutla Kominfo bertujuan untuk meningkatkan literasi, edukasi, dan pengambilan langkah preventif dalam hal penanggulangan kebakaran hutan melalui komunikasi publik.

Apalagi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyebut ada empat tahapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bila mengacu Inpres Nomor 3 Tahun 2020.

Pertama adalah tahap pencegahan, lalu penanganan kebakaran itu sendiri, selanjutnya setelah terjadinya kebakaran, dan yang terakhir penegakan hukum serta denda atas pelanggaran hukum itu sendiri.

Desk Karhutla Kemkominfo yang menekankan pada aspek komunikasi publik penanganan karhutla di setiap tahapan menjadi sarana yang tepat untuk mengurangi -atau bahkan jika mungkin meniadakan- kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2020.

Niat baik yang dilakukan dengan baik akan membuahkan hasil yang baik. Insyaallah, dengan penanganan teknis yang tepat, komunikasi publik yang efektif dan melibatkan partisipasi semua pihak, karhutla 2020 bisa kita cegah, tangani dan mitigasi bersama-sama. Semoga.

**)Prof Dr Widodo Muktiyo SE MCom adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.*